

BERITA RESMI STATISTIK



Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk di Provinsi Aceh September 2020

Persentase
Penduduk Miskin
Aceh pada
September 2020
sebesar 15,43
persen

- Pada Bulan September 2020, jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 833,91 ribu orang (15,43 persen), bertambah sebanyak 19 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2020 yang jumlahnya 814,91 ribu orang (14,99 persen).
- Selama periode Maret 2020–September 2020, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan dan perkotaan mengalami kenaikan. Di perkotaan, persentase penduduk miskin naik sebesar 0,47 poin (dari 9,84 persen menjadi 10,31 persen), sedangkan di daerah perdesaan naik 0,50 poin (dari 17,46 persen menjadi 17,96 persen).
- Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok, dan ikan tongkol/tuna/cakalang. Sedangkan untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan, bensin, dan listrik.
- Pada periode Maret 2020–September 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) mengalami kenaikan dari 2,716 pada Maret 2020 menjadi 2,847 pada September 2020. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) mengalami kenaikan dari 0,708 pada Maret 2020 menjadi 0,831 pada September 2020.
- Pada September 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Aceh yang diukur oleh *Gini Ratio* tercatat sebesar 0,319. Angka ini sedikit mengalami penurunan dibanding Maret 2020 yang tercatat sebesar 0,323.
- Distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 21,20 persen pada September 2020. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 19,63 persen, sementara untuk daerah perdesaan angkanya tercatat sebesar 22,71 persen.

1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh

Selama periode tahun 2017 sampai dengan 2020 persentase penduduk miskin di Aceh menunjukkan kecenderungan menurun. Pada Maret 2017, persentase penduduk miskin Aceh mencapai 16,89 persen. Angka ini turun menjadi 15,92 persen pada September 2017. Kenaikan persentase penduduk miskin terjadi pada Maret 2018 yaitu menjadi 15,97. Pada periode September 2018 sampai dengan Maret 2020 persentase penduduk miskin di Aceh menunjukkan penurunan, yaitu dari 15,68 persen (September 2018), 15,32 persen (Maret 2019), 15,01 persen (September 2019), 14,99 persen (Maret 2020) sementara pada September 2020 sebesar 15,43 persen.

Dilihat menurut jumlah, penduduk miskin di Aceh sedikit berfluktuatif. Pada Maret 2017 jumlah penduduk miskinnya berjumlah 872,61 ribu orang, kemudian turun menjadi 829,80 ribu orang pada September 2017. Kondisi berbeda terjadi pada Maret 2018, dimana jumlahnya mengalami kenaikan menjadi 839,50 orang. Pada periode September 2018 sampai dengan September 2019 jumlah penduduk miskin di Aceh menunjukkan penurunan, yaitu dari 831,50 ribu orang (September 2018) menjadi 819,44 ribu orang (Maret 2019) dan 809,76 ribu orang pada September 2019. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Aceh mengalami kenaikan menjadi 814,91 ribu orang pada Maret 2020 dan kembali naik menjadi 833,91 ribu orang pada September 2020.

Secara khusus jika dilihat perkembangan tingkat kemiskinan di Aceh pada periode Maret 2020-September 2020, persentase penduduk miskin di Aceh mengalami kenaikan dari 14,99 persen menjadi 15,43 persen. Berdasarkan daerah, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 0,47 poin, yaitu dari 9,84 persen pada Maret 2020 menjadi 10,31 persen pada September 2020, sedangkan di daerah perdesaan mengalami kenaikan sebesar 0,50 poin, yaitu dari 17,46 persen menjadi 17,96 persen pada periode yang sama. Dilihat menurut jumlah, penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2020 naik sebanyak sebelas ribu orang menjadi 184,89 ribu orang dibanding Maret 2020, sedangkan di daerah perdesaan naik sebanyak delapan ribu orang menjadi 649,02 ribu orang.

Tabel 1.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh
Menurut Daerah, Tahun 2017 – 2020

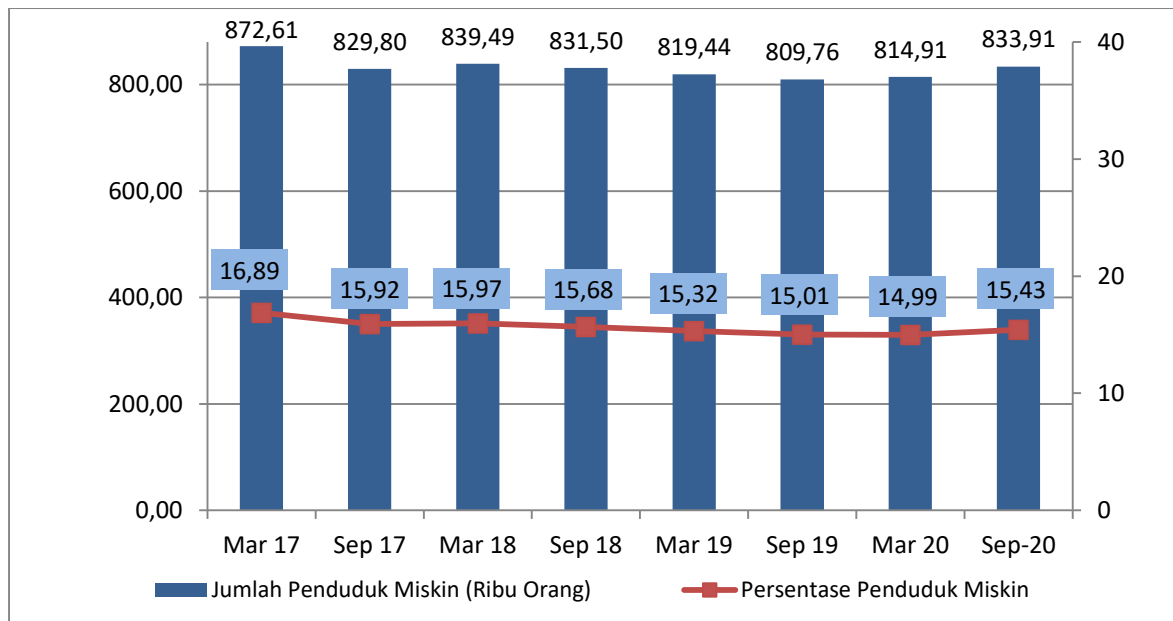
Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
<u>Perkotaan</u>		
Maret 2017	172,35	11,11
September 2017	166,77	10,42
Maret 2018	172,09	10,44
September 2018	163,36	9,63
Maret 2019	168,11	9,68
September 2019	165,97	9,47
Maret 2020	173,90	9,84
September 2020	184,89	10,31
<u>Perdesaan</u>		
Maret 2017	700,26	19,37
September 2017	663,03	18,36
Maret 2018	667,40	18,49
September 2018	668,14	18,52
Maret 2019	651,33	18,03
September 2019	643,79	17,68
Maret 2020	641,01	17,46
September 2020	649,02	17,96
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>		
Maret 2017	872,61	16,89
September 2017	829,80	15,92
Maret 2018	839,49	15,97
September 2018	831,50	15,68
Maret 2019	819,44	15,32
September 2019	809,76	15,01
Maret 2020	814,91	14,99
September 2020	833,91	15,43

Sumber: Susenas 2017-2020

Beberapa faktor yang diduga terkait dengan tingkat kemiskinan di Aceh pada periode Maret 2020–September 2020 antara lain:

1. Ekonomi Aceh pada triwulan III-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,10 persen dibanding triwulan III-2019 (y-on-y).
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2020 (6,59 persen) lebih tinggi dibanding Februari 2020 (5,42 persen).
3. Sebanyak 388 ribu penduduk usia kerja (10,01 persen) terdampak Covid-19 pada Agustus 2020, baik itu menjadi pengangguran, sementara tidak bekerja, pengurangan jam kerja maupun menjadi bukan angkatan kerja (selain bekerja dan pengangguran) .
4. Bantuan sosial pusat dan daerah relatif berjalan dengan baik, sehingga kemiskinan tidak semakin parah.

Gambar 1.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh, Tahun 2017-2020



Sumber: Susenas 2017-2020

2. Perubahan Garis Kemiskinan di Provinsi Aceh

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Selama periode Maret 2020–September 2020, Garis Kemiskinan naik sebesar 0,40 persen, yaitu dari Rp.522.126,- per kapita per bulan menjadi Rp.524.208,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, Garis Kemiskinan naik sebesar 0,41 persen, dari Rp.541.451,- per kapita per bulan pada Maret 2020 menjadi Rp.543.685,- per kapita per bulan pada September 2020. Sedangkan untuk daerah perdesaan naik sebesar 0,35 persen yaitu dari Rp.512.886,- per kapita per bulan pada Maret 2020 menjadi Rp.514.663,- per kapita per bulan pada September 2020.

Memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2020 sebesar 75,98 persen (73,48 persen di perkotaan dan 77,30 persen di perdesaan), sedangkan pada Maret 2020 sebesar 76,04 persen.

Tabel 2.
Garis Kemiskinan di Provinsi Aceh Menurut Daerah,
Tahun 2017 - 2020

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Perkotaan</u>			
Maret 2017	330.153	127.858	458.011
September 2017	347.811	132.061	479.872
Maret 2018	351.777	134.561	486.338
September 2018	360.318	136.434	496.752
Maret 2019	364.040	137.577	501.617
September 2019	377.620	140.281	517.900
Maret 2020	398.026	143.425	541.451
September 2020	399.504	144.182	543.685
<u>Perdesaan</u>			
Maret 2017	331.267	94.463	425.730
September 2017	346.070	96.799	442.869
Maret 2018	353.915	100.825	454.740
September 2018	362.463	104.779	467.242
Maret 2019	372.626	106.943	479.569
September 2019	387.367	110.248	497.615
Maret 2020	396.615	116.270	512.886
September 2020	397.816	116.847	514.663
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>			
Maret 2017	330.958	104.496	435.454
September 2017	346.552	107.572	454.124
Maret 2018	353.291	111.335	464.626
September 2018	361.835	114.830	476.666
Maret 2019	370.093	116.842	486.935
September 2019	384.381	120.033	504.414
Maret 2020	397.032	125.093	522.126
September 2020	398.316	125.892	524.208

Sumber: Susenas 2017-2020

Pada September 2020, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya sama yaitu beras dengan sumbangan sebesar 16,88 persen di perkotaan dan 21,06 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap Garis Kemiskinan (9,22 persen di perkotaan dan 11,33 persen di perdesaan). Komoditi berikutnya adalah ikan tongkol/tuna/cakalang (6,10 persen di perkotaan dan 5,51 persen di perdesaan).

Sementara itu komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan yaitu 5,35 persen di perkotaan dan 5,41 persen di perdesaan. Berikutnya yaitu bensin (4,07 persen di perkotaan dan 3,90 persen di perdesaan) dan listrik (3,26 persen di perkotaan dan 1,86 persen di perdesaan).

Tabel 3.
Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%) di Provinsi Aceh, September 2020

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Makanan</u>	<u>73,48</u>		<u>77,30</u>
Beras	16,88	Beras	21,06
Rokok kretek filter	9,22	Rokok kretek filter	11,33
Tongkol/tuna/cakalang	6,10	Tongkol/tuna/cakalang	5,51
Cabe merah	5,95	Cabe merah	4,94
Kue Basah	4,88	Kue Basah	4,36
Telur ayam ras	3,11	Telur ayam ras	3,20
Gula pasir	2,78	Gula pasir	2,70
Bandeng	2,31	Bawang merah	2,47
Bawang merah	2,28	Kembung	1,98
Kembung	2,11	Bandeng	1,57
<u>Bukan Makanan</u>	<u>26,52</u>		<u>22,70</u>
Perumahan	5,35	Perumahan	5,41
Bensin	4,07	Bensin	3,90
Listrik	3,26	Listrik	1,86
Pendidikan	1,73	Pendidikan	1,24
Pakaian jadi laki-laki dewasa	1,48	Pakaian jadi perempuan dewasa	1,13
Angkutan	1,33	Pakaian jadi laki-laki dewasa	1,12

Sumber: Susenas 2020

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode Maret 2020 – September 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 2,716 pada Maret 2020 menjadi 2,847 pada September 2020. Pada periode yang sama, Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,708 menjadi 0,831. Meningkatnya nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan, sementara kondisi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga cenderung semakin besar.

Tabel 4.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
di Provinsi Aceh Menurut Daerah, Tahun 2017 – 2020

Daerah/Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
(1)	(2)	(3)
<u>Perkotaan</u>		
Maret 2017	1,553	0,352
September 2017	1,667	0,371
Maret 2018	1,576	0,374
September 2018	1,517	0,352
Maret 2019	1,593	0,375
September 2019	1,499	0,361
Maret 2020	1,551	0,354
September 2020	1,612	0,378
<u>Perdesaan</u>		
Maret 2017	3,589	1,002
September 2017	3,472	0,963
Maret 2018	3,424	0,925
September 2018	3,408	0,889
Maret 2019	3,150	0,799
September 2019	3,100	0,814
Maret 2020	3,276	0,878
September 2020	3,459	1,055
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>		
Maret 2017	2,978	0,807
September 2017	2,917	0,781
Maret 2018	2,845	0,752
September 2018	2,803	0,717
Maret 2019	2,644	0,661
September 2019	2,580	0,667
Maret 2020	2,716	0,708
September 2020	2,847	0,831

Sumber: Susenas 2017-2020

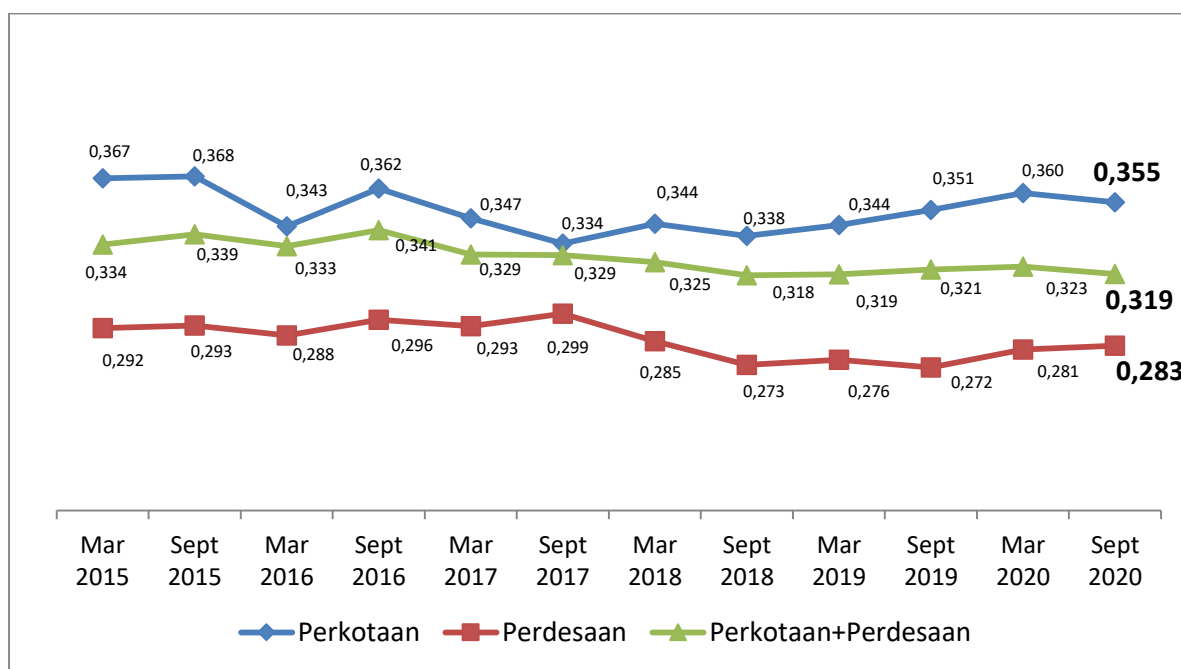
Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perdesaan lebih tinggi dari di perkotaan. Pada periode Maret 2020 – September 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan di perkotaan naik dari 1,551 menjadi 1,612 sedangkan di perdesaan naik dari 3,276 menjadi 3,459. Sementara itu untuk Indeks Keparahan Kemiskinan pada periode yang sama di perkotaan naik dari 0,354 menjadi 0,378 sedangkan di perdesaan naik dari 0,878 menjadi 1,055.

4. Perkembangan *Gini Ratio*

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah *Gini Ratio*. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. *Gini Ratio* Aceh pada Maret 2015 tercatat sebesar 0,334 dan meningkat menjadi 0,349 pada September 2015. *Gini Ratio* Aceh menurun pada periode Maret 2016 menjadi 0,333 tetapi meningkat menjadi 0,341 pada September 2016. Pada Maret 2017 *Gini Ratio* Aceh kembali turun menjadi 0,329. Sedangkan pada September 2017 tidak terjadi perubahan dibanding periode Maret 2017, yaitu tetap pada angka 0,329. Selanjutnya pada Maret 2018 *Gini Ratio* Aceh kembali turun menjadi 0,325. Pada periode September 2018 – Maret 2019 angka *Gini Ratio* bergerak pada angka 0,318 dan 0,319. Pada periode September 2019 – Maret 2020 kembali naik menjadi 0,321 dan 0,323. Selanjutnya pada September 2020 turun menjadi 0,319.

Berdasarkan daerah, *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,355. Angka ini menurun dibanding periode Maret 2020 yang sebesar 0,360. Untuk daerah perdesaan *Gini Ratio* September 2020 tercatat sebesar 0,283. Angka ini sedikit lebih tinggi dibanding Maret 2020 yang sebesar 0,281.

Gambar 2
Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Aceh Menurut Daerah, 2015–2020



5. Perkembangan Distribusi Pengeluaran Maret 2020 – September 2020

Selain *Gini Ratio* ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada September 2020, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 21,20 persen yang berarti Aceh berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan September 2020 ini meningkat jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 20,85.

Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari *Gini Ratio*, ukuran ketimpangan Bank Dunia pun mencatat hal yang sama yaitu ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan di perdesaan. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada September 2020 adalah sebesar 19,63 atau tergolong ketimpangan rendah. Sementara itu, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan pada September 2020 adalah sebesar 22,71 persen yang juga berarti berada pada kategori ketimpangan rendah.

Tabel 5
Distribusi Pengeluaran Penduduk di Aceh, September 2019 - September 2020
(Persentase)

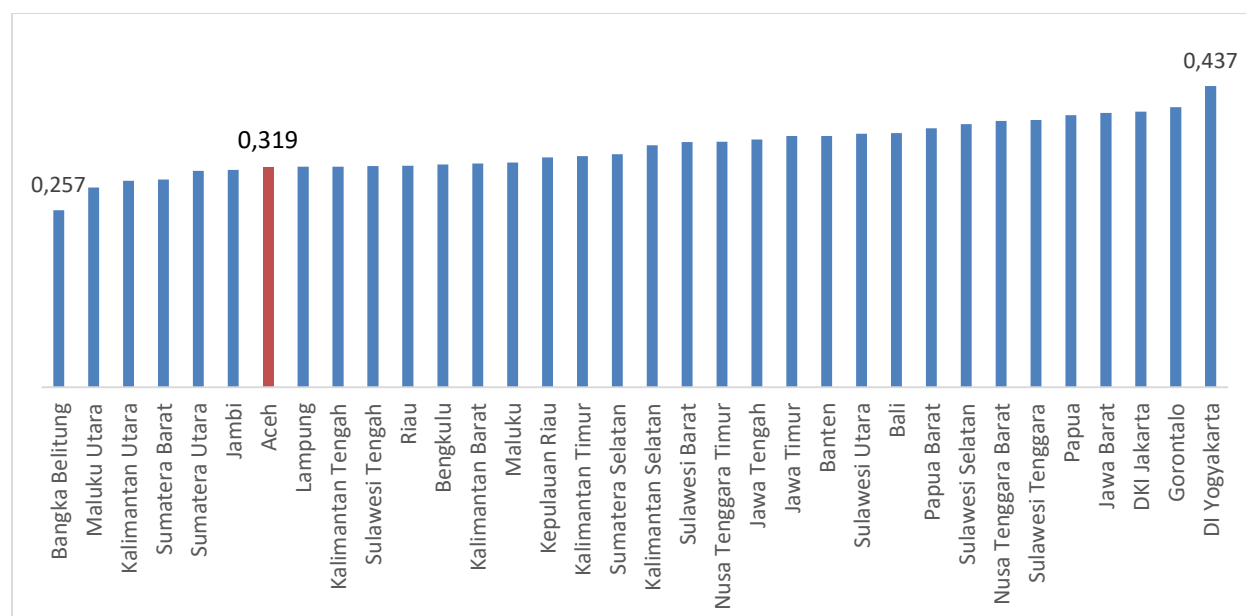
Daerah/Tahun	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Atas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>Perkotaan</u>				
September 2019	18,68	38,68	42,64	100
Maret 2020	18,79	37,43	43,78	100
September 2020	19,63	36,23	44,13	100
<u>Perdesaan</u>				
September 2019	23,04	40,39	36,56	100
Maret 2020	22,68	40,15	37,17	100
September 2020	22,71	39,57	37,72	100
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>				
September 2019	20,75	38,38	40,87	100
Maret 2020	20,85	38,28	40,87	100
September 2020	21,20	37,90	40,90	100

Sumber: Susenas 2019-2020

6. *Gini Ratio* Menurut Provinsi pada September 2020

Pada September 2020, provinsi yang mempunyai nilai *Gini Ratio* tertinggi tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 0,437, sementara yang terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung dengan *Gini Ratio* sebesar 0,257 (Gambar 3). Sedangkan Aceh berada pada urutan ke delapan *Gini Ratio* terendah dari seluruh provinsi se-Indonesia.

Gambar 3
***Gini Ratio* menurut Provinsi, September 2020**



7. Penjelasan Teknis dan Sumber Data

- a. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini juga dapat dihitung *Head Count Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.
- b. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.
- c. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
- d. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
- e. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
- f. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) modul konsumsi. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.

Diterbitkan oleh:



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI ACEH**

Jln I. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 50
Kuta Alam Banda Aceh,
Telp (62-651) 23005,
Mailbox : pst1100@bps.go.id



Konten Berita Resmi Statistik dilindungi oleh Undang-Undang, hak cipta melekat pada Badan Pusat Statistik. Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi tulisan ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.